

# **KOOPTASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP JURNALISME MEDIA LOKAL: ANALISI POLA RELASI WARTAWAN DAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA INDRAMAYU DALAM PEMBERITAAN**

**Frisky Diaslestarie<sup>1</sup>, Teguh Yuwono<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50139  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman <http://fisip.undip.ac.id/> E-mail [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRAK**

Pemerintah sebagai penyedia informasi publik memiliki kewajiban untuk menyediakan akses informasi publik. Diseminasi merupakan penyebarluasan informasi dengan memperhatikan prinsip pengelolaan informasi dan komunikasi. Efektivitas diseminasi informasi ditentukan oleh aktivitas komunikasi yang dijalinnya terutama dengan membentuk relasi. Pemerintah menjalin relasi dengan media massa untuk mencapai masifikasi. Hubungan ini sering dikategorikan sebagai hubungan mutualisme. Pada kenyataannya hubungan mutualisme tersebut susah untuk dicapai karena terdapat tekanan sistem yang memaksa untuk diikuti agar tetap eksis. Dalam menjalankan profesinya wartawan berpegang teguh pada apa yang disebut sebagai etika profesi jurnalistik. Namun, pengaplikasian etika jurnalistik ini susah untuk dicapai ketika sistem yang diciptakan tidak dalam keadaan setara sehingga menjadi fitur buruk dalam hubungan mutualisme jurnalis dan pemerintah. Hal ini dibuktikan dalam penelitian mengenai relasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dan wartawan daerah Kabupaten Indramayu dalam pemberitaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola relasi antara jurnalis dan pemerintah berdasar pada etik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena sosial. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa hubungan mutualisme antara Dinas Komunikasi dan Informatika dan wartawan daerah Indramayu merupakan hubungan yang didominasi oleh satu aktor. Wartawan daerah terkooptasi oleh sistem yang diciptakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Sistem tersebut juga tanpa sadar membawa keduanya untuk mengabaikan esensi serta etika jurnalistik. Sistem mutualisme yang diciptakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Indramayu berkontribusi besar atas pelanggaran etika jurnalistik. Sistem

kooperatif mutualis tersebut tidak cocok untuk diaplikasikan membina hubungan pemerintah dan jurnalis. Hubungan antara jurnalis dan pemerintah dapat dibangun melalui kontribusi pemerintah untuk mengembangkan kompetensi jurnalis melalui workshop, diskusi, dan uji kompetensi.

**Kata Kunci: Etika Jurnalisme, Kooptasi, Hubungan Mutualisme**

#### **ABSTRACT**

*The government as a provider of public information has an obligation to provide access to public information. Dissemination is the dissemination of information by paying attention to the principles of information and communication management. The effectiveness of information dissemination is determined by the communication activities that are carried out, especially by forming relationships. The government establishes relations with the mass media to achieve massification. This relationship is often categorized as a mutualistic relationship. In reality, this mutualistic relationship is difficult to achieve because there is system pressure that forces us to follow it in order to continue to exist. In carrying out their profession, journalists adhere to what is called journalistic professional ethics. However, the application of journalistic ethics is difficult to achieve when the system created is not equal, so it becomes a bad feature in the mutual relationship between journalists and the government. This is proven in research regarding the relationship between the Communication and Informatics Office and regional journalists in Indramayu Regency in reporting. This research aims to analyze the pattern of relations between journalists and the government based on ethics. The method used is descriptive qualitative to understand social phenomena. Data collection techniques through observation, interviews and documentation studies. This research reveals that the mutualistic relationship between the Communications and Informatics Office and Indramayu regional journalists is a relationship dominated by one actor. Regional journalists are co-opted by a system created by the Communications and Information Office. This system also unknowingly leads both of them to ignore the essence and ethics of journalism. The mutualism system created by the Indramayu Communication and Information Office contributed greatly to violations of journalistic ethics. This mutualist cooperative system is not suitable for application in developing relations between government and journalists. Relations between journalists and the government can be built through the government's contribution to developing journalist competencies through workshops, discussions and competency tests.*

**Keywords: Journalism Ethics, Co-optation, Mutualism Relations**

## PENDAHULUAN

Eksistensi penyelenggaraan pemerintah yang demokratis didukung oleh prinsip keterbukaan dan transparansi. Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan prinsip good governance yang menjadi acuan terselenggaranya pemerintahan yang ideal. Pemerintah sebagai penyedia informasi publik memiliki kewajiban untuk menyediakan akses sebagaimana ciri penting negara demokrasi diukur melalui keterbukaan informasi publik. Keterbukaan tersebut sebagai upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah dengan melibatkan pengawasan publik.

Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik oleh pemerintah tidak terlepas dari tujuannya disamping pemenuhan hak publik, pemerintah juga menjalankan perannya sebagai humas. Salah satunya diupayakan untuk memberikan informasi mengenai kinerja aparat pemerintah dalam rangka menciptakan kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintahan sehingga dilakukan upaya transparansi kegiatan yang

disampaikan melalui pemberitaan sehingga masyarakat bisa menilai dan mengawasi (watch-dog) keberjalanan pemerintah.

Dalam perkembangannya, pemerintah sebagai penyelenggara kehumasan memilih jalan untuk menjalin kerjasama dengan media massa untuk meningkatkan intensi penyebaran informasi publik dalam bentuk pemberitaan. Hubungan antara media massa dan pemerintah sering dikaitkan sebagai hubungan dua kepentingan yang berbeda, selayaknya kompetitor, sifat adversary (permusuhan) yang menghasilkan pembatasan dalam kekuasaan pemerintah. Disisi lain Goran Eriksson dan Johan Ostman (2013) mendefinisikan hubungan antara jurnalis dan pemerintah dapat terbentuk dalam kerangka bermusuhan (*adversary*). Ini mengacu pada media bertindak sebagai pengawas dengan mempertahankan sikap kritis dan cenderung menentang.

Namun seiring berjalannya waktu hubungan antara media massa dan pemerintah mengalami

penurunan ketegangan, keduanya membentuk suatu hubungan yang bersifat kooperatif dengan membentuk sistem kemitraan. Bentuk kemitraan tersebut merupakan bentuk mutualisme yang terjadi antara pemerintah dan media massa. Pemerintah diuntungkan dengan pemberitaan yang dikemas dan didiseminasikan secara massif oleh media (Nurjanah, 2015).

Hubungan kemitraan antara media massa dan pemerintah menempatkan keduanya pada keadaan setara dengan sistem berbagi sumber daya untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Hubungan bersifat kooperatif ini dijalankan dengan prinsip masing-masing pihak baik pemerintah dan media massa mendapatkan keuntungan yang sama. Menurut (Göran Eriksson and Johan Östman, 2013) mengemukakan bahwa hubungan yang dipandang sebagai kooperatif apabila menyiratkan keterlibatan kolaboratif antara media dan pemerintah.

Namun, pada kenyataannya hubungan mutualisme tersebut susah

untuk dicapai ketika keadaannya tidak berimbang. Dalam beberapa keadaan menempatkan pemerintah dalam keadaan yang lebih tinggi dan mendominasi kerangka mutualisme. Pemerintah seakan memberikan komando dominan untuk mengatur jalannya kemitraan. Kecenderungan tersebut mengantarkan media massa yang dikooptasi oleh pemerintah.

Habermas (1996) menyebutkan bahwa media massa defisit kritik karena kebutuhannya akan uang untuk beroperasi. Kritik Habermas mengenai media massa kontemporer didapatkan bahwa kooptasi kapitalisme dan kekuasaan politik menyebabkan media massa tidak dapat merepresentasikan nilai demokrasi. Media massa sarat akan campur tangan humas untuk kepentingan membentuk citra politik melalui polesan dekorasi iklan. Media massa tidak lagi kritis dan menjadi tidak berbeda dengan kehumasan feodal yang semata-mata memberikan seremoni kekuasaan (Serepina, 2023).

Pada akhirnya, media massa akan hanya berfokus pada kegiatan

yang menghasilkan keuntungan dengan mengabaikan hal-hal dasar. Media massa mengejar keuntungan dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah menciptakan berita yang membingkai positif pemerintah dan berlaku lunak menghilangkan sikap kritisnya. Loyalitas utama media massa bukan lagi ditujukan untuk masyarakat, namun tunduknya media massa pada pemerintah untuk kepentingan materil, bahkan hingga pada pengabaian etik profesi yang dimilikinya.

Sejalan dengan hal diatas, hubungan antara media massa dan pemerintah teraktualisasi dalam hubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dan wartawan daerah Kabupaten Indramayu. Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai humas pemerintah mengupayakan terciptanya citra baik pemerintah melalui masifikasi pemberitaan. Disamping itu, media massa berperan untuk memproduksi berita yang memuat informasi publik serta menyebarkannya secara luas ke khalayak umum terutama masyarakat di Kabupaten Indramayu. Kontribusi tersebut diperoleh dari proses

kemitraan yang terjadi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan wartawan daerah Indramayu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 47 Tahun 2022. Namun ada hal yang perlu diperhatikan dalam kemitraan yang dijalin tersebut. Hubungan kemitraan harusnya menghantarkan hubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dan wartawan daerah pada keadaan berimbang. Namun dalam implementasinya, bentuk kemitraan tersebut hanya sebagai label, dimana hubungan keduanya tetap didominasi oleh pemerintah sebagai penyelenggara kemitraan. Keadaan demikian akan menimbulkan kecenderungan bahwa relasi yang terjadi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dan wartawan daerah telah terkooptasi sistem hingga berujung pada pengabaian etika jurnalisme.

## **KERANGKA TEORI**

### **Relasi Jurnalis dan Pemerintah**

Dalam jurnal artikel Göran Eriksson and Johan Östman (2013) menyebutkan bahwa relasi antara negara dalam ini pemerintah dan media tidak semata-mata mengenai

regulasi, subsidi dan kepemilikan negara. Namun, melibatkan informasi yang dibingkai. Relasi yang terjadi merupakan hubungan timbal balik yang didalamnya terdapat proses interaksi.

Relasi antara jurnalis dan pemerintah oleh Göran Eriksson and Johan Östman (2013) diringkas menjadi tiga model signifikan yang menggambarkan hubungan jurnalis dan pemerintah. *Pertama*, *dependence*. Model “ketergantungan” ini menggunakan konsep subsidi informasi dengan menyampaikan informasi siap pakai untuk dipublikasikan oleh jurnalis. *Kedua*, adalah model *exchange*, dimana model ini mengaktualisasikan hubungan timbal balik (resiprokal), dimana antara pemerintah dan jurnalis memiliki kebutuhan yang berbeda dan mengendalikan sumber daya strategis yang berbeda pula. Pemerintah membutuhkan publisitas sedangkan jurnalis membutuhkan akses sumber yang kredibel. Selanjutnya yang ketiga, *adversarial*, dimana menonjolkan hubungan peran profesional yang berbenturan.

Jurnalisme menganggap pemerintah memiliki motif atas tindak perilakunya.

Dalam jurnal Göran Eriksson and Johan Östman (2013) disebutkan mengenai karakteristik hubungan antara jurnalis dan pemerintah. Terdapat dua karakteristik yang dikategorikan untuk memandang hubungan antara keduanya, yaitu *Cooperative* dan *Adversarial*. Karakteristik tersebut diperoleh dari proses produksi berita yang dilakukan antara 2 pihak yang terjalin relasi. Produksi berita itu sendiri dibangun dari 2 fase, yaitu fase interaksional (pertemuan aktual atau interaksi antara jurnalis-pemerintah) dan fase konstruksi berita (momen setelah fase interaksional) dimana berita tersebut dibuat, diedit dan siap dipublikasikan.

### **Kooptasi Media Massa**

Dunia kontemporer telah berhasil membangun struktur-struktur sistem karena perkembangan teknologi dan industrialisasi yang pesat. Habermas menilai bahwa kecanggihan teknologi yang tercipta membuka

jalan bagi media massa yang dikelola melalui mekanisme kapitalis mengubah perilakunya dari saluran kritik publik menjadi organ kapitalis yang berorientasi pada laba.

Media massa sulit untuk menghindari tekanan kooptasi dan lemah terhadap sistem ketika struktur ekonomi memaksanya menjadi semakin lemah (Bambang, 2014). Media massa seakan diberikan pilihan, dikooptasi agar tetap eksis atau mati jika melepaskan diri dari sistem. Media massa tidak lagi kritis dan menjadi tidak berbeda dengan kehumasan feodal yang semata-mata memberitakan seremoni kekuasaan

### **Etika Jurnalisme**

Media massa atau pers memiliki fungsi yang signifikan sebagai lembaga kontrol dimana kebebasan pers dijamin oleh negara. Kebebasan yang dimiliki tersebut membuat pers dapat meliput atau memberitakan apapun yang dianggap memiliki nilai berita. Namun, disisi lain kebebasan yang dimiliki tersebut dapat menjebak media untuk sekadar berdiri menjadi institusi bisnis yang

semata-mata mencari keuntungan dibanding menjalankan fungsinya.

Agar jurnalis dapat bekerja secara profesional maka seorang jurnalis perlu untuk memahami esensi jurnalisme itu sendiri. Bill Kovach dan Tom Resentie (2001) menyebutkan bahwa terdapat sembilan elemen jurnalisme yang wajib diketahui:

- a. Kewajiban utama jurnalisme adalah pada kebenaran;
- b. Loyalitas utama jurnalisme adalah kepada warga;
- c. Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi;
- d. Jurnalis harus tetap independen dari sumber berita;
- e. Jurnalis harus berlaku sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan;
- f. Jurnalis harus menyediakan forum kritik dari publik;
- g. Jurnalis harus membuat hal yang penting menarik dan relevan;
- h. Jurnalis menjaga beritanya agar komprehensif dan proporsional;
- i. Jurnalis memiliki kewajiban untuk mengikuti suara hati nurani

(Bill Kovach & Tom Resentiel, 2001).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk meneliti keadaan objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Lokasi penelitian ini secara umum dilakukan di Kabupaten Indramayu. Subjek penelitian yang diperoleh berdasar *purposive sampling*.

Teknik pengumpulan data menggunakan tahapan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model sirkuler Sugiyono yang terdiri dari tahap deskriptif, reduksi dan seleksi dimana masing-masing tahapan akan melewati fase berpikir, bertanya, analisis, kesimpulan, dan pencandraan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Jurnalis Media Lokal yang Terkooptasi Melalui Skema Pertukaran**

Hubungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu dan wartawan daerah dibentuk karena adanya persamaan intensi yaitu pada publikasi berita. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu disamping kewajibannya sebagai humas pemerintah dalam menciptakan citra positif membutuhkan media penyebaran informasi yaitu media.

Hubungan antara Dinas Komunikasi dan Informatika dan wartawan daerah tersebut secara konkrit tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kemitraan Wartawan Daerah Dalam Pembinaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi Pembangunan di Kabupaten Indramayu. Hubungan kemitraan ditujukan untuk publikasi berita dalam rangka memasifkan informasi pembangunan atau kegiatan pemerintahan di Kabupaten Indramayu. Berdasar peraturan tersebut hubungan yang terjadi yang terjadi dibangun sebagai bentuk penghargaan berupa insentif atau kompensasi jasa.

Ketentuan berita yang dihitung mendapatkan insentif merupakan berita yang bernarasi positif meromantisasi kekuasaan pemerintah. Namun, terdapat pengecualian akan berita kritik, yaitu berita yang bersifat kritik membangun tetap diikutsertakan sebagai berita yang mendapatkan kompensasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika juga sangat terbuka apabila terdapat wartawan yang ingin mempublikasi ulang berita rilisnya. Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika menawarkan kesukarelaan bagi wartawan untuk mempublikasi ulang bahkan dalam keadaan berita tanpa dilakukan rekonstruksi. Wartawan merasa tidak terdapat masalah terutama menyangkut terkait profesinya sebagai wartawan yang merepresentasikan sebuah media massa yang harus bersifat independen.

Wartawan mengaku hal tersebut tidak berpengaruh terhadap independensi medianya. Melalui kegiatan kemitraan ini wartawan

mendapatkan subsidi berita dari Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu bentuk berita yang siap pakai untuk disebarluaskan kepada wartawan. Wartawan merasa terbantu dengan adanya hal tersebut. Kondisi lapangan yang tidak menentu dalam mencari berita, Dinas Komunikasi dan Informatika hadir untuk mengisi kekosongan berita diproduksi oleh wartawan. Bukan hanya mendapatkan berita, wartawan daerah juga bisa mendapatkan insentif atas tulisan dan publikasi berita yang dibuat.

Hubungan tersebut disebut sebagai hubungan kemitraan yang bersifat setara yang pada kenyataan hubungan tersebut hanyalah relasi yang tidak menampilkan hubungan kesetaraan. Kemitraan menjadi penyematan nama belaka bagi relasi yang terjalin. Dinamika kegiatannya tetap berpusat pada ketetapan yang telah ditentukan oleh pemerintah, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut menunjukkan bahwa media massa terutawan wartawan daerah telah terkooptasi sistem yang diciptakan

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Hubungan timbal balik tersebut memperlihatkan relasi yang tidak setara antara wartawan daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Wartawan daerah terkooptasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pihak pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan kemitraan. Relasi kemitraan tersebut memiliki sistem insentif akan karya jurnalistik jurnalis media lokal yang telah mempublikasi berita positif mengenai kabupaten Indramayu. Jurnalis telah menjual karya jurnalistiknya kepada pemerintah dan bertindak seakan menjadi humas pemerintah. Selanjutnya, terdapat kelonggaran serta seruan ajakan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mempublikasi berita yang diterbitkan olehnya (fabrikasi berita). Hal tersebut menjadi sejalan ketika wartawan daerah merasa bahwa hal yang telah dipilih adalah sebuah kebenaran, wartawan daerah sebagai pihak yang terkooptasi.

Kemudian, wartawan juga keliru memahami arti independen.

Independen dimaksud lebih dari sekedar netralitas, dimana wartawan walaupun mendapat informasi kegiatan pemerintah harus tetap dapat memiliki idealisme dan sensitifitas sendiri memandang informasi kegiatan pemerintah. Penting untuk wartawan menjaga jarak personal agar menghasilkan penilaian yang independen. Hal tersebut menjadi kabur ketika wartawan *sharing* berita dan tidak menekankan sisi kritis terhadap karya jurnalistiknya.

### **Mutualisme yang Mengabaikan Etika: Karakteristik Hubungan *Cooperative* Wartawan Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika Indramayu**

Analisis karakter hubungan kemitraan tersebut menggunakan teori Goran Eriksson dan Johan Ostman (2013) yang mengkategorikannya kedalam 2 karakteristik, yaitu *Cooperative* atau *Adversarial*. Kategorisasi tersebut diperoleh dari analisis proses produksi berita yang terdiri dari fase interaksional dan fase konstruksi berita.

Fase interaksional merupakan bentuk pertemuan aktual atau interaksi yang terjadi antara wartawan dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Wartawan mengaku mereka sering melakukan komunikasi dalam rangka meliput berita, bahkan dikatakan bahwa masing-masing dari mereka tidak keberatan untuk berbagi bahan untuk berita. Kemudian, antara wartawan daerah dan Dinas Komunikasi terjalin interaksi yang cukup intens seperti halnya melakukan liputan bersama di lapangan hingga sekedar berbincang bertukar informasi. Interaksi tersebut juga terjalin melalui grup koordinasi di WhatsApp dalam rangka untuk mengirimkan informasi, berbagi berita, serta agenda pemerintahan lainnya.

Namun, sayangnya pihak Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyelenggara kehumasan belum berperan penuh menciptakan relasi media (*media relation*). Hal yang mendasari hal tersebut adalah keterbatasan anggaran. Hal itu juga yang mendasari kegiatan media

relasi yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tidak menjangkau seluruh wartawan daerah dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, merupakan fase konstruksi berita yang didefinisikan oleh Goran Eriksson dan Johan Ostman (2013) sebagai fase dimana sebuah berita dibuat, diedit serta siap dipublikasikan. Dalam fase ini pula peneliti banyak menemukan anomali kegiatan yang mengarahkan pada abainya wartawan serta Dinas Komunikasi dan Informatika pada esensi jurnalisisme itu sendiri.

Kegiatan kemitraan antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu dengan wartawan daerah, wartawan dalam hal ini dapat mengkonstruksi ulang atau menyalin berita yang sudah dipublikasikan. Dalam keadaan wartawan yang sulit dalam mencari bahan berita, rilis berita Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi alternatif bagi sebagian wartawan untuk mengisi kekosongan bahan berita yang ditulis. Wartawan diperbolehkan untuk menyalin atau mengkonstruksi ulang berita rilis

Dinas Komunikasi dan Informatika, begitupun dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sangat terbuka apabila rilis beritanya dipublikasi ulang walaupun disalin seluruhnya.

**Gambar 1.** Judul artikel berita Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu



*Sumber: Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu Tahun 2024*

**Gambar 2.** Judul artikel berita Media Cakra Bangsa



*Sumber: Artikel berita Media Cakra Bangsa Tahun 2024*

Artikel berita tersebut membahas hal yang sama yaitu penghargaan Adipura kepada Kabupaten Indramayu, hanya saja terdapat rekonstruksi pada tajuk berita yang dirilis. Kedua berita tersebut mempunyai jarak waktu rilis dua hari, Dinas Komunikasi dan

Informatika pada tanggal 5 Maret 2024, disusul oleh media Cakra Bangsa pada 7 Maret 2024.

Selain mengkonstruksi ulang berita, dalam mekanisme kemitraan ini wartawan diperbolehkan untuk menyalin ulang secara keseluruhan berita yang dirilis oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Berita tersebut dibebaskan untuk disalin seluruhnya, setengahnya, ataupun dilakukan konstruksi ulang untuk penulisannya karena pada prinsipnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu merasa terbantu akan hal tersebut.

**Gambar 5.** Artikel berita Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu

DIKOMINFO INDRAMAYU – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Indramayu bersama tim gabungan menyelenggarakan kegiatan...

Sunguran yang terlanjur akan digunakan untuk Unit Layanan Pelanggan (ULP) Okadring Iru...

Karena belum mengenteng ULP, Satpol PP setempat pun menyelenggarakan kegiatan...

Peringatan tersebut merupakan kali kedua. Sebelumnya, yakni pada 24 Februari 2024, lokasi...

*Sumber: Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu Tahun 2024*

## Gambar 6. Artikel berita Media Kabar Indramayu

**KABARINDRAMAYU**- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol Damkar) Kabupaten Indramayu bersama tim gabungan menyegel pembangunan gedung PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Bangunan yang rencananya akan digunakan untuk Unit Layanan Pelanggan (ULP) di lokasinya di Desa Jumbleng, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu.

Karena belum mengantongi izin, Satpol PP setempat pun menyegel dan menghentikan pembangunan gedung ULP itu, Senin, 18 Maret 2024.

Penyegelan tersebut merupakan kali kedua. Sebelumnya, yakni pada 24 Februari 21 proyek sudah sempat ditutup.

*Sumber: Artikel berita  
kabarindramayu.pikiran-rakyat.com  
Tahun 2024*

## Gambar 7. Artikel berita Media Suara Indonesia News

**Suara Indonesia News – Indramayu**. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Indramayu bersama tim gabungan menyegel pembangunan gedung milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Bangunan yang rencananya akan digunakan untuk Unit Layanan Pelanggan (ULP) di lokasinya di Desa Jumbleng, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu.

Karena belum mengantongi izin, Satpol PP setempat pun menyegel dan menghentikan pembangunan gedung ULP itu, Senin, 18 Maret 2024.

Penyegelan tersebut merupakan kali kedua. Sebelumnya, yakni pada 24 Februari 21 lokasi proyek sudah sempat ditutup.

*Sumber: Artikel berita  
suaraindonesianews.com Tahun  
2024*

Hal tersebut menunjukkan secara jelas bahwa baik dari pihak wartawan daerah maupun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu mengabaikan esensi jurnalisme hingga melanggar etika jurnalistik. Hal tersebut menyalahi elemen kewajiban jurnalisme pada kebenaran. Kebenaran ini mengacu pada bagaimana wartawan memperoleh

berita, apakah wartawan mengikuti kegiatan peliputan? Apakah wartawan hadir menyaksikan kegiatan? Apakah wartawan dapat mempertanggung jawabkan apa yang ditulisnya? Hal tersebut tidak bisa diperoleh ketika wartawan hanya mengambil berita rilis orang lain.

Di sisi lain, pihak Dinas Komunikasi dan Informatika juga memperbolehkan tindakan tersebut dengan alasan bahwa pihaknya merasa diuntungkan dengan publikasi yang masif. Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai katalis dimana memberikan sinyal hijau bagi wartawan untuk bertindak mengabaikan esensi jurnalisme itu sendiri. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal ini juga seakan melegalkan tindakan fabrikasi terhadap berita yang dirilisnya. Salah satu elemen Bill Kovach dan Tom Resentiel (2001) menyebutkan bahwa “Esensi jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi” Kalimat tersebut menunjukkan bahwa jurnalis selain menulis sebuah berita, perlu dilakukan pengecekan terhadap

berita yang ditulisnya, yaitu isi berita, kebenaran berita, narasumber dan lain-lain.

Kemudian, peneliti menemukan bahwa beberapa wartawan kemitraan memiliki kecenderungan menulis berita yang ber-*framing* positif, salah satu alasannya agar berita yang diterbitkan tidak menjadi masalah. Wartawan memiliki kecenderungan subjektif dalam menulis berita, menjadikan wartawan hanya menuliskan berita yang bersifat positif saja. Berita positif tersebut bukan hanya menyingkirkan kemungkinan masalah yang akan terjadi ketika wartawan menulisnya, namun berita positif tersebut juga menguntungkan secara materiil karena berita tersebut mendapat kompensasi jasa penulisan dari skema kemitraan yang terjadi.

**Gambar 8.** Artikel berita wartawan dan media kemitraan



*Sumber: Media Cirebon Raya Tahun 2022*

**Gambar 8.** Artikel berita wartawan non-kemitraan



*Sumber: Media Tjimanoeek Tahun 2022*

Diatas merupakan perbedaan wartawan dalam membingkai berita atas kegiatan tertentu, dimana berita yang diterbitkan oleh media kemitraan lebih menekankan sisi positif kegiatan yang ada. Sedangkan, media non-kemitraan dimana lebih menekankan sisi kritik terhadap kegiatan pemerintah yang diselenggarakan.

## KESIMPULAN

Hubungan yang terjadi antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu dan wartawan daerah dalam kerangka publikasi berita terbingkai dalam hubungan kemitraan. Kemitraan tersebut diciptakan dalam rangka membina hubungan baik keduanya terutama dalam publikasi berita positif di Kabupaten Indramayu. Di dalam

hubungan kemitraan tersebut terdapat berbagai macam dinamika yang terjadi. Peneliti menyimpulkan bahwa hubungan keduanya memiliki karakter hubungan *cooperative* dengan model pertukaran namun terkooptasi oleh sistem yang diciptakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Relasi yang terjadi juga menimbulkan pengabaian esensi jurnalistik didalamnya.

Peneliti mendapatkan bahwa hubungan kemitraan yang terjadi antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu dan wartawan daerah melalui analisis fase interaksional dan fase konstruksi berita. Fase interaksional antara keduanya menunjukkan interaksi positif dengan minimnya konflik atas interaksi yang terjadi serta narasi pemberitaan yang suportif. Fase interaksional menunjukkan hubungan yang cukup intens diantara keduanya. Sedangkan fase konstruksi berita menunjukkan bahwa wartawan kemitraan daerah memiliki kecenderungan untuk mempublikasi berita yang membingkai positif pemerintah secara umum Kabupaten

Indramayu, dimana wartawan kemitraan daerah yang menarasikan secara positif kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dibanding aspek bermasalah. Namun, hubungan positif ini telah melenakan wartawan daerah khususnya wartawan kemitraan sehingga banyak diantara kegiatan kemitraan tanpa sadar mengabaikan esensi jurnalistik.

Penyematan “kemitraan” sangatlah tidak tepat untuk menggambarkan hubungan yang terjadi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dan wartawan daerah karena tidak merepresentasikan hubungan yang setara. Hubungan yang terjadi terjalin secara kooperatif bersifat mutualis tersebut terkooptasi akan sistem yang diciptakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Wartawan yang dilemahkan untuk mengikuti dominasi keinginan pemerintah. Sistem yang diciptakan seperti, sistem insentif dengan komersialisasi karya jurnalistik, fabrikasi berita, wartawan daerah seakan berperan seperti humas

dengan menayangkan seremonial kegiatan pemerintah.

Disisi lain kegiatan wartawan melanggar etika, seperti melakukan plagiasi dengan menyalin atau merekonstruksi rilis berita Dinas Komunikasi dan Informatika, menulis berita tanpa hadir meliput acara ditempat, cenderung menuliskan berita yang bernarasi positif hingga orientasi profesi kepada keuntungan materiil semata. Sementara itu Dinas Komunikasi dan Informatika bersikap selayaknya hal yang terjadi tidak menyalahi aturan dan memberikan kelonggaran tersebut. Tanpa disadari pengabaian tersebut dapat mencederai kredibilitas profesi wartawan sendiri. Beberapa esensi jurnalisme diabaikan oleh keduanya. Pertama, kewajiban pada kebenaran dan disiplin verifikasi yang tidak didapatnya ketika wartawan hanya mengambil rilis berita Dinas Komunikasi dan Informatika. Esensi loyalitas dan bertindak sebagai pemantau kekuasaan kepada warga yang tidak bisa dipenuhi ketika wartawan daerah berfokus pada

berita yang hanya menayangkan seremonial kegiatan pemerintah. Esensi independen dari sumber berita yang tidak bisa dicapai ketika wartawan daerah menurunkan semangatnya untuk mempublikasi berita kritis terhadap suatu kejadian.

## **SARAN**

- a. Peningkatan komunikasi serta intensi pertemuan untuk meningkatkan kemistri antara Dinas Komunikasi dan Informatika dan wartawan daerah melalui kegiatan relasi media.
- b. Membenahi skema kemitraan yang dijalankan, terutama terhadap kegiatan yang mengabaikan esensi serta etika jurnalisme atau membubarkan sistem kemitraan yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- David L. Kurtz dan Louis E. Boone. (2002). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Arief. (2021). *Top Government Public Relation Award 2021 "Sinergi Pranata Humas (GPR) Untuk Indonesia*

- Maju*". Jakarta: GPR Institute.
- Bambang, A. (2014). Periode Perkembangan Media Massa. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 18(1)*.
- Bill Kovach & Tom Resentiel. (2001). *The Element Of Journalism*. New York: Crown Publisher.
- Ghassani dan Praptining Sukowati. (2016). Bentuk Hubungan Pers Dengan Pemerintah Terkait Dengan Fungsi Media Sebagai Kontrol Sosial. *Publisia Vol 1(2)*, 174.
- Göran Eriksson and Johan Östman. (2013). Cooperative or Adversarial? Journalists' Enactment of the Watchdog Function in Political News Production. *The International Journal of Press/Politics*, 304-324.
- Habermas, J. (2006). Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research. *Communication Theory. Vol 16(4)*, 411-426.
- Halin dan Baskin. (2016). Hubungan Antara Pemahaman Kode Etik Jurnalistik dengan Profesionalisme Kerja Wartawan. *Prosiding Jurnalistik Vol 2(2)*, 273-278.
- King, Brian D, dkk. (2022, January 6). Media Collaboration Aims to Provide More In-Depth Journalism . *AoI*.
- Mancini, D. C. (2004). *Comparing Media Systems (Three Models of Media and Politics)*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Puspita Asri Praceka dan Handaningtias. (2016). Persepsi Wartawan dan Humas Pemerintah Provinsi Banten Terhadap Hubungan Keduanya. *Jurnal Riset Komunikasi*, 144.
- Rasid, A. (2011). Pola Interaksi Pers, Pemerintah dan Masyarakat Dalam Membentuk Sistem Pers Pancasila: Suatu Analisis Retrospektif. *Sosiohumaniora Volume 13 Nomor 12*, 189-210.
- Serepina, K. d. (2023). Defisit Kritis Media Massa: Menimbang Kebutuhan akan Regulasi Diri Media Massa Berdasar Pemikiran Jurgen Habermas. *Jurnal Dialektika Komunika Vol.11 (1)* , 26-41.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Venezia Indra Ghassani dan Sukowati. (2016). Bentuk Hubungan Pers Dengan Pemerintah Terkait Dengan Fungsi Media Sebagai Kontrol Sosial. *Jurnal Ilmu Administrasi Volume 01 Nomor 2*, 170.